



# Mendagri Rampungkan RAPBD DKI

## Temukan Anggaran Yang Tidak Tepat

JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri sudah merampungkan evaluasi RAPBD DKI Jakarta Tahun 2015. Proses tersebut lebih cepat dua hari dari target semula pada 13 Maret 2015. Dokumen yang telah ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo itu dikirim ke pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Hari ini evaluasi RAPBD DKI oleh Tim Kemendagri sudah final dan sudah saya tandatangani. Semoga sore ini (kemarin, Red) bisa kirim ke Pemda/Gubernur DKI," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (11/3).

Pada prinsipnya APBD DKI tidak sejatinya terlambat. Politisi PDIP itu tak menginginkan dana masyarakat terlambat satu haripun. Karena akan merugikan masyarakat. "Jadi harus sesuai tahapan dan APBD DKI jangan sampai tersandera yang merugikan masyarakat DKI," tegasnya.

Selain itu, ia juga berharap semua anggaran yang cair nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Tidak ada satu rupiah pun yang tak transparan penggunaannya. "Satu sen pun uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan direncanakan dengan transparan," ujarnya.

Sementara soal keputusan DPRD yang terus menggalang hak angket terhadap Gubernur Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, menurut Tjahjo, pihaknya akan tetap menghormatinya. Begitu juga langkah Ahok yang melaporkan dugaan 'dana siluman' di DKI Jakarta ke KPK, serta laporan masyarakat terkait pembuatan oknum DPRD ke Polda Metro Jaya. "Keputusan politik DPRD harus kami hargai dan langkah Gub Ahok ke KPK dan proses Hukum di Polda Metro," imbuhnya.

Dalam proses pemeriksaan, Kemendagri menemukan beberapa pengajuan anggaran yang tidak pas. Sebut saja soal anggaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI. Mendagri menilai belanja pegawai yang dianggarkan sebanyak Rp 19,02 triliun tidak tepat. Jumlah tersebut hampir 1/4 dari total Rp 67,5 triliun RAPBD DKI. "Tidak wajar dan tidak rasional karena menempati hampir seperempat total belanja Rp 67,5 triliun," ujar Tjahjo.

Jumlah yang dikoreksi itu juga diakuinya lebih besar daripada penganggaran keperluan masyarakat. Penanganan banjir di ibukota misalnya, hanya mendapat jatah Rp 5,3 triliun. Postur anggaran bagi pelayanan masyarakat nampak lebih kecil daripada gaji pegawai Pemprov.

Selain itu koreksi juga dilakukan pada poin vital. Seperti belanja pendidikan yang menurut Mendagri masih kurang atau menurun.

Koreksi tersebut didapat dengan membandingkan antara mata anggaran di bidang pendidikan pada RAPBD 2015 dengan APBD 2014. "Meskipun belanja Pendidikan telah di atas 20 persen, namun untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 Rp 14,5 triliun (setara 21,62 persen), masih menurun dibanding TA 2014 yang mencapai 25,31 persen," imbuh Tjahjo.

Politisi PDIP itu juga menerangkan soal 'term and condition' atau ketentuan dan kondisi rancangan anggaran. Dengan memakai pagu tahun anggaran 2014 yang sudah disesuaikan, nominal sebesar Rp 63,65 triliun itu hanya diperuntukan bagi kebutuhan belanja wajib.

Durasinya juga berubah, jika anggaran sebelumnya berfungsi satu tahun penuh, kali ini anggaran hanya difungsikan selama sembilan bulan. "Pagu TA 2014, berdasarkan angka Perubahan APBD Rp 63,65 T, digunakan untuk membiayai sisa kebutuhan selama 9 bulan yang diprioritaskan untuk belanja wajib dan mengikat," jelas Tjahjo.

Pagu tersebut memang betul diprioritaskan untuk belanja pembangunan ibukota. Terutama infrastruktur yang sudah berjalan dan bersifat strategis. Seperti pembangunan Mass Rapid Transportation atau MRT dengan anggaran Rp 4,62 triliun atau pengadaan bus Transjakarta dengan nilai Rp 1 triliun.

Pengerukan sungai, perbaikan gorong-gorong dan jalanan yang rusak akibat banjir harus diperhatikan. Bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat Jakarta juga menjadi kewajiban Pemprov DKI. "Sedangkan untuk belanja-belanja yang tidak perlu seperti belanja perjalanan dinas ke luar negeri, kunjungan kerja, sosialisasi, rapat kerja, prinsipnya boleh tapi dikurangi," ujar Tjahjo. (adn)